

Responsivitas Tenaga Pendidik Terhadap Penyusunan Kebijakan Surat Edaran Pedoman Etika *Artificial Intelligence*

Ismi Adnin^{1*}; Sapriya Sapriya²; Rahmat Rahmat³, Abhi Rachma Ramadhan⁴, Juwita Juwita⁵

^{1,2,3,5} Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia; ismiadnin@upi.edu, sapriya@upi.edu, rahmat@upi.edu, juwita96@upi.edu

⁴ SMP Negeri 44 Palembang, Palembang, Indonesia; abhi.rachma21@guru.smp.belajar.id

* Correspondence : ismiadnin@upi.edu

ABSTRAK

Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji responsivitas tenaga pendidik dalam menyikapi penyusunan kebijakan pedoman etika penggunaan kecerdasan buatan (AI). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Populasi dan sampel dalam kajian ini terdiri dari tiga orang tenaga pendidik, terutama yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila di SMP Negeri 44 Palembang. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis dengan memadukan fakta-fakta yang ada dengan teori-teori hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang mengatur etika penggunaan AI, khususnya di bidang pendidikan bagi peserta didik, sangat diperlukan. Banyaknya penyalahgunaan yang terjadi, termasuk masalah terkait data dan pedoman penggunaannya, menegaskan perlunya kebijakan yang mencakup kebutuhan dan kondisi terkini.

Kata kunci : *Etika, Kebijakan, Kecerdasan Buatan, Pedoman*

ABSTRACT

The purpose of this article is to examine educators' responsiveness to the development of ethical guidelines for the use of artificial intelligence (AI). The research method applied is an empirical juridical approach with a descriptive research design. The population and sample in this study consist of three educators, particularly those teaching the subject of Pancasila Education at National Junior High School (SMP) 44 Palembang. The data collected were systematically analyzed by integrating observed facts with applicable positive law theories in Indonesia. The research findings indicate that policies regulating the ethical use of AI, especially in educational contexts for students, are urgently needed. The frequency of misuse, including issues related to data and user guidelines, underscores the need for policies that address current needs and conditions.

Keywords : *Ethics, Policy, Artificial Intelligence, Guidelines*

Pendahuluan

Kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) merupakan teknologi yang semakin populer dalam kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan bagi tenaga pendidik dan peserta didik. Penggunaan AI di Indonesia telah memudahkan banyak orang dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka, dengan banyak ragam aplikasi AI yang digunakan, seperti ChatGPT. Namun, dalam penggunaannya, tidak sedikit pengguna yang kurang memperhatikan etika, yang berpotensi merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Pada *era Society 5.0* ini, penting bagi masyarakat untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk meningkatkan kualitas, bukan sebaliknya. Di era globalisasi ini, kemajuan teknologi menghadirkan dilema kompleks dengan dampak positif dan negatif yang kerap terjadi secara bersamaan (Nursanti et al., 2023). Pesatnya perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat, namun juga membawa dampak negatif, seperti menurunnya kemampuan literasi siswa, berkurangnya aspek kemanusiaan dalam lingkungan pendidikan, terjadinya distorsi dalam interaksi sosial, serta meningkatnya isolasi individu akibat penggunaan teknologi yang berlebihan (Dewanto et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan pedoman etika dalam penggunaan AI sebagai langkah antisipatif. Penggunaan AI seperti ChatGPT dalam pendidikan harus diatur melalui kebijakan yang jelas mengenai etika dan moral, terutama untuk mencegah penyalahgunaan seperti plagiarisme (Amala et al., 2023). Di tengah kemajuan teknologi yang cepat, diperlukan aturan yang mengatur penggunaan AI agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi penggunanya, khususnya dalam ranah akademik dan keterampilan (Hidayanti & Azmiyanti, 2023). Kebutuhan akan pedoman etika ini muncul karena adanya kekhawatiran terhadap pelanggaran etika dalam penggunaan AI.

Saat ini, pemerintah merespons perkembangan teknologi AI dengan menyusun kebijakan berupa surat edaran tentang pedoman etika AI yang rencananya akan disahkan pada Desember 2023. Kebijakan ini bersifat preventif dan represif terhadap keberadaan AI di semua kalangan. Surat edaran ini berfungsi sebagai kontrol agar penggunaan AI, seperti ChatGPT, tetap mematuhi nilai-nilai etika dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu, meskipun teknologi AI terus berkembang, masyarakat Indonesia, khususnya tenaga pendidik dan peserta didik, diharapkan tetap mengembangkan kompetensinya secara mandiri, meskipun ada teknologi yang mempermudah pekerjaan. AI merupakan alat yang dapat membantu pekerjaan-pekerjaan di bidang intelektual yang berkaitan dengan kemampuan manusia, seperti memecahkan masalah, belajar, membangun kreativitas, bernalar, memahami, dan berinteraksi dengan lingkungan (Maihani et al., 2023). Surat edaran terkait penggunaan AI ini adalah bentuk kebijakan pemerintah untuk mengarahkan pemanfaatan AI secara bijak.

Surat edaran mengenai pedoman etika AI ini disusun berdasarkan pemantauan terhadap kondisi aktual, yang menunjukkan pentingnya pengesahan kebijakan ini. Surat edaran ini merupakan langkah awal untuk menghasilkan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut pengamatan Yehezkel Dror, implementasi kebijakan publik saat ini dinilai masih rendah tingkat kepuasannya (Hasbullah & Wahyono, 2020). Hal ini berkaitan dengan penelitian ini yang berfokus pada responsivitas tenaga pendidik dalam penyusunan kebijakan etika penggunaan AI, apakah kebijakan ini diperlukan dan akan membantu atau malah sebaliknya. Kebijakan ini berlaku di semua ranah kehidupan karena dampak besar dari hadirnya teknologi AI, yang penggunaannya sangat tergantung pada etika individu. Namun,

tidak semua orang sadar akan pentingnya menggunakan AI dengan bijak, sehingga peraturan terkait hal ini menjadi sangat penting.

Tanpa adanya kebijakan yang mengatur penggunaan AI, banyak pengguna yang cenderung menggunakan teknologi ini dengan kurang bijak, yang pada akhirnya dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Di bidang pendidikan, khususnya, banyak peserta didik yang menyalahgunakan AI, sehingga menyulitkan tenaga pendidik dalam proses pembelajaran serta memengaruhi aspek pengetahuan dan kemampuan peserta didik. Di lokasi penelitian ini, yaitu SMP Negeri 44 Palembang, meskipun ada pengawasan dalam penggunaan teknologi, masih terdapat peserta didik yang tidak memanfaatkan AI secara tepat, terutama di luar lingkungan sekolah di mana guru tidak bisa memantau penggunaan AI saat peserta didik mengerjakan tugas. Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan resmi seperti surat edaran atau peraturan untuk memberikan dasar hukum dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan AI. Pentingnya penelitian ini adalah untuk memberikan tinjauan kritis terhadap topik ini, serta memastikan bahwa perilaku pengguna AI tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan pedoman etika yang ditetapkan.

Surat edaran pedoman etika penggunaan AI mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan, termasuk Mira Tayyiba, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang menyatakan bahwa penggunaan AI yang semakin meluas dapat meningkatkan risiko penggunaan yang tidak tepat. Sebelum disahkan, surat edaran ini dirumuskan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait. Surat edaran ini nantinya berlaku di seluruh Indonesia, sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap dampak potensial dari AI, dan menunjukkan kesiapan pemerintah untuk menghadapi implikasi perkembangan teknologi AI di era modern ini.

Saat ini, banyak yang tidak menggunakan AI dengan tepat dan beretika, hanya memanfaatkan sisi praktisnya saja. Padahal, tujuan utama kehadiran AI adalah untuk mempermudah dan mendorong inovasi, bukan untuk digunakan secara tidak bertanggung jawab. Penggunaan AI, khususnya ChatGPT, oleh para akademisi mencakup penerjemahan dan merangkum materi, yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga pendidik dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran (Marbun, 2023). Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji responsivitas tenaga pendidik terkait penyusunan kebijakan pedoman etika penggunaan AI. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam mempertimbangkan kebijakan-kebijakan terkait AI, sehingga pemanfaatannya di lingkungan pendidikan dapat dilakukan dengan bijak sesuai dengan pedoman etika yang ditetapkan dalam surat edaran atau kebijakan lain.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang berkaitan dengan penerapan ketentuan normatif secara aktual pada berbagai kejadian di lingkungan masyarakat. Penelitian deskriptif, yang diterapkan pada artikel ini, bertujuan untuk menyajikan gambaran representatif tentang responsivitas tenaga pendidik dalam merespons penyusunan kebijakan terkait pedoman etika penggunaan *Artificial Intelligence*.

Subjek dalam kajian ini terdiri dari beberapa tenaga pendidik di SMP Negeri 44 Palembang, khususnya dari mata pelajaran Pendidikan Pancasila, dengan tiga orang guru sebagai informan. Pemilihan guru Pendidikan Pancasila sebagai informan relevan mengingat

permasalahan etika dalam penggunaan AI dan kebutuhan akan peraturan terkait, terutama di lingkungan sekolah yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum. Para informan tersebut juga menggunakan ChatGPT, sehingga dapat memberikan wawasan mengenai penggunaan yang tepat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh mencakup data primer berupa peraturan perundang-undangan dan data sekunder seperti buku dan artikel. Analisis data dilakukan secara sistematis dengan mengintegrasikan fakta-fakta lapangan dengan teori-teori hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Substansi Kebijakan Surat Edaran tentang Pedoman Etika Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*)

Kebijakan pemerintah disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Di era ini, perkembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI), memerlukan perlindungan agar penggunaannya tetap terarah dan sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan. Kebijakan semacam ini, seperti surat edaran, dapat menjadi pedoman etika dalam penggunaan AI. Misalnya, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial yang diterbitkan pada 19 Desember 2023, menetapkan tiga prinsip utama: nilai etika, pelaksanaan nilai etika, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan dan pengembangan AI. Surat edaran ini menjadi acuan resmi bagi masyarakat Indonesia, menyediakan payung hukum untuk mengatur etika penggunaan AI yang terus berkembang di berbagai bidang.

Surat edaran tersebut menekankan pentingnya etika dan adab dalam penggunaan AI, agar pengguna tetap mengendalikan teknologi AI dengan bijaksana, bukan sebaliknya. Selain itu, diharapkan surat edaran ini menumbuhkan rasa tanggung jawab individu saat memanfaatkan AI. Surat edaran ini, yang disusun dengan memperhatikan kebijakan di negara-negara maju, merupakan langkah preventif pemerintah untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya etika dalam penggunaan teknologi AI. Banyak negara telah memberikan rekomendasi beragam terkait tantangan sosial dan psikologis penggunaan AI. Rekomendasi ini juga disusun untuk mendorong kepercayaan publik terhadap teknologi AI sebagai alat yang mendukung kebutuhan masyarakat (Saheb & Saheb, 2023). Selain itu, AI dianggap relevan dalam mendukung tahap pendataan dan pengelolaan pendidikan secara teknologi (Gulson, 2022).

Teknologi berbasis AI memainkan peran penting dalam proses pembelajaran bagi peserta didik (Adnin & Sapriya, 2024). Mengingat manfaatnya yang besar, penggunaan AI di dunia pendidikan sebaiknya tidak dilarang, melainkan perlu diadaptasi dengan bijak. Hal ini sangat penting mengingat perbedaan karakteristik setiap peserta didik dalam proses belajarnya, sehingga guru diharapkan mampu menerapkan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan relevan dengan tuntutan era digital saat ini untuk mencapai kompetensi peserta didik secara optimal (Adnin et al., 2023). Kebijakan dalam surat edaran tentang penggunaan AI sejalan dengan kondisi dan tujuan pembelajaran saat ini, serta mendukung penerapannya di lingkungan pendidikan.

2. Responsivitas Pendidik terhadap Penyusunan Kebijakan Surat Edaran Pedoman Etika Kecerdasan Buatan (AI)

Sajian Keamanan data, terutama dari segi kerahasiaan, harus menjadi perhatian utama dalam penggunaan teknologi, termasuk informasi yang dihasilkan oleh program chatbot AI. Oleh karena itu, instansi sebaiknya mengembangkan aturan kebijakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data dari hasil interaksi dengan AI (Subiyantoro et al., 2023). Kebijakan ini, termasuk pedoman etika penggunaan AI, sangat penting untuk bidang Pendidikan Pancasila. Dengan adanya peraturan yang jelas, pendidik dapat membimbing siswa dalam menggunakan AI secara bertanggung jawab, sehingga batasan tertentu dapat diterapkan untuk mencegah kekacauan yang mungkin terjadi tanpa adanya aturan.

Di masa depan, terdapat kemungkinan bahwa kecerdasan fisik akan digantikan oleh mesin, dan kecerdasan akal dapat digantikan oleh kecerdasan buatan (AI). Namun, kecerdasan emosional dan spiritual tidak mungkin digantikan oleh mesin. Oleh karena itu, pembelajaran tentang aspek-aspek ini sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak agar mereka dapat mengembangkan kemampuan yang tidak tergantikan oleh teknologi (Ali & Erihadiana, 2021). Para pendidik, terutama guru Pendidikan Pancasila, juga mengungkapkan perlunya kebijakan yang memfokuskan pada kecerdasan emosional dan spiritual, yang memerlukan bimbingan manusia. Keterampilan ini tidak dapat diajarkan oleh kecerdasan buatan, melainkan harus dilakukan oleh pendidik yang memiliki kedalaman pemahaman dan pengalaman.

Pendidikan yang diberikan kepada pemuda seharusnya tidak hanya terfokus pada aspek linguistik, tetapi juga mencakup pendidikan di bidang digital, termasuk kecerdasan buatan (AI). Mengingat perubahan kondisi dunia saat ini, penting bagi generasi muda untuk memahami dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi (Timur, 2018). Oleh karena itu, diharapkan bahwa siswa dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal dengan memanfaatkan AI secara bijaksana dalam proses pembelajaran, dengan panduan dari surat edaran yang akan diterbitkan.

Berikut adalah hasil wawancara dengan beberapa guru, terutama guru Pendidikan Pancasila di sekolah, yang menyampaikan pandangan mereka terkait dengan penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pendidikan. Salah satunya adalah PL, yang mengungkapkan pandangannya tentang pentingnya aturan dalam memanfaatkan AI di kalangan pelajar.

"Menurut saya, dengan semakin banyaknya program teknologi yang muncul, termasuk kecerdasan buatan seperti ChatGPT yang kini populer di kalangan pelajar, peraturan yang jelas sangat diperlukan. Ketika mereka menyelesaikan tugas, sering kali program ini dimanfaatkan untuk mengefisienkan pekerjaan dan proses belajar. Namun, tak jarang mereka justru kurang memahami jawaban yang diberikan saat ditanya lebih lanjut. Karena alasan inilah, saya sangat mendukung adanya surat edaran mengenai AI ini, agar penggunaannya bisa dimanfaatkan dengan baik dan prosedurnya lebih jelas." (Hasil Wawancara, 18 September 2024).

Pandangan serupa turut diungkapkan oleh HF, yang menyampaikan bahwa kebijakan terkait penggunaan AI sangat penting untuk diterapkan, karena dapat mendorong para pengguna, khususnya peserta didik, agar lebih berhati-hati dan bijak dalam memanfaatkannya.

"Menurut saya, peraturan terkait AI ini dapat membuat penggunaannya lebih berhati-hati dan tidak sembarangan dalam menggunakannya, terutama saat proses belajar sebagai peserta didik. Dalam surat edaran tersebut, seperti halnya peraturan atau kebijakan lainnya, tentu akan ada penjelasan yang detail, termasuk sanksi yang mungkin diterima jika terjadi pelanggaran." (Hasil Wawancara, 18 September 2024).

ARR menekankan bahwa pentingnya penerapan pedoman etika dalam penggunaan teknologi AI tidak hanya berlaku bagi peserta didik, tetapi juga bagi tenaga pendidik dan pihak lainnya. Ia menggarisbawahi bahwa kebijakan ini diperlukan agar penggunaan AI tetap berada dalam kendali manusia, memastikan teknologi menjadi alat yang bermanfaat tanpa menggantikan peran dan tanggung jawab penggunaannya.

"Tentu saja, hal ini tidak hanya berlaku bagi peserta didik, tetapi juga bagi kami sebagai pendidik dan bidang lainnya, bukan hanya di sektor pendidikan. Dengan adanya surat edaran ini, kami harus mematuhiinya. Seiring munculnya ide-ide baru dan perkembangan pesat AI di masa depan, diharapkan para pengguna dapat tetap berada dalam batas penggunaan yang semestinya. Jadi, bukan teknologi yang menguasai kita, tetapi kitalah yang harus menguasai teknologi." (Hasil Wawancara, 18 September 2024).

Artinya, sangat diperlukan aturan khusus dalam penggunaan AI, terutama pada program seperti ChatGPT yang menjadi bagian dari teknologi AI tersebut. Meskipun sekolah sudah memiliki aturan umum terkait penggunaan teknologi, dukungan kebijakan yang lebih spesifik mengenai program yang sering digunakan oleh peserta didik, seperti ChatGPT, tetap dibutuhkan. Hal ini semakin relevan mengingat tingginya rasa ingin tahu peserta didik terhadap teknologi.

Sejalan dengan pernyataan Adnin & Hubi, (2023), karakter rasa ingin tahu peserta didik sangat penting untuk dikembangkan, terutama dalam menghadapi pesatnya kemajuan teknologi yang dapat berkontribusi positif dalam proses belajar mereka. Oleh karena itu, Ramadhan et al., (2024) menekankan pentingnya pengaturan yang tepat dan cermat dalam penggunaan teknologi di berbagai kegiatan, agar terbentuk warga negara yang cerdas, inklusif, dan responsif terhadap perubahan, khususnya di bidang teknologi.

Kesimpulan

Kebijakan yang dibuat dimulai dengan penerbitan surat edaran mengenai etika penggunaan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), terutama yang berkaitan dengan pendidikan yang digunakan oleh siswa (peserta didik). Hasil penelitian deskriptif yang dilakukan melalui studi literatur menunjukkan bahwa kebijakan ini sangat diperlukan, karena dapat membantu pendidik dalam proses kegiatan pembelajaran, sehingga siswa dapat memanfaatkan teknologi dengan benar. Tanpa adanya aturan yang jelas, ada risiko siswa dan pihak lainnya dapat melakukan kecurangan, yang justru akan merugikan diri mereka sendiri. Selain itu, pendidik menginginkan agar isi kebijakan mencerminkan kondisi nyata saat ini, dan baik pendidik maupun siswa perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini, terutama dalam hal penggunaan kecerdasan buatan secara bijak.

Referensi

Adnin, I., & Hubi, Z. B. (2023). Analisis karakter rasa ingin tahu siswa secara kritis pada perkembangan teknologi berimplikasi dalam pembelajaran 1. *JIPIS*, 32(2), 98–109.

- Adnin, I., Nuriyani, R., Ramadhan, A. R., & Damayanti, S. (2023). Analisis Implikasi Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Pada Pembelajaran Pkn. *Educatio*, 18(2), 304–314. <https://doi.org/10.29408/edc.v18i2.24310>
- Adnin, I., & Sapriya. (2024). The Urgency Of Implementing Artificial Intelligence -Based Project Learning In The 21st Century. *International Student Conference on Business, Education, Economics, Accounting, and Management (ISC-BEAM)*, 369–377.
- Ali, M., & Erihadiana, M. (2021). Manajemen Sumberdaya Manusia Dalam Pengembangan Kompetensi Guru. *Thawalib | Jurnal Kependidikan Islam*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.54150/thawalib.v2i1.6>
- Amala, Y., Thohir, M., Reditiya, V. E., Intan, N., & Sari, P. (2023). Refleksi Mahasiswa dalam Berkeadaban Digital melalui ChatGPT Pendahuluan Perkembangan zaman yang semakin maju membuat setiap orang harus mampu mengikuti dan menguasai berbagai bentuk teknologi . Salah satunya yakni Society 5 . 0 yang bertujuan untuk mempe. *Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 13(2), 109–128. <https://doi.org/10.33367/ji.v13i2.3798>
- Dewanto, R., Ramadhan, A. R., Firdaus, F. F., Mozrapa, E. S., & Hidayat, T. (2023). Menumbuhkan Sikap Karakter Kebangsaan Melalui Pendidikan Sejarah pada Era Disrupsi Abad-21. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 9(2), 343–350. <https://doi.org/10.32884/ideas.v9i2.1307>
- Gulson, K. N. (2022). *Menata Ulang Globalisasi dan Pendidikan*. Routledge.
- Hasbullah, & Wahyono, S. (2020). BUDAYA PATERNALISTIK DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK (Mempertegas Integritas Perumus Kebijakan di Kabupaten Pamekasan). *Jurnal Yustitia*, 21(2). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v21i2.1016>
- Hidayanti, W., & Azmiyanti, R. (2023). Dampak Penggunaan Chat GPT pada Kompetensi Mahasiswa Akuntansi: Literature Review. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper*, 3(1), 83–91.
- Maihani, S., Syalaisha, S. N., & Nur, T. M. (2023). *Peran Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Inovasi Pemasaran*. 17, 1651–1661.
- Marbun, T. O. (2023). The Implementation of Artificial Intelligence, Chatgpt, And Critical Thinking Method for Academic Endeavors at Theological Higher Education. *Journal Didaskalia*, 6(2), 84–100. <https://doi.org/10.33856/didaskalia.v6i2.309>
- Nursanti, N. N. P., Handayani, H., Paramita, C., Tofanie, S., & Ramadhan, A. R. (2023). Urgensi Pendidikan Karakter Dalam Membentuk Digital Citizenship yang Kritis. *Educatio*, 18(1), 129–142. <https://doi.org/10.29408/edc.v18i1.14054>
- Ramadhan, A. R., Nuriyani, R., Arpanudin, I., Putra, M. L. D., & Adnin, I. (2024). Dinamika Kewarganegaraan Liberal: Tantangan Global dan Masa Depan Hak Asasi Manusia. *Ideas*, 10(1). <https://doi.org/10.32884/ideas.v10i1.1589>
- Saheb, T., & Saheb, T. (2023). Topical review of artificial intelligence national policies: A mixed method analysis. *Technology in Society*, 74.
- Subiyantoro, S., Ekosusilo, M., Ismail, I., & ... (2023). Analysis of Teachers' and Students' Perceptions of Using Artificial Intelligence Chatbots in Higher Education. *Cognitive ...*, 1(1), 1–9.
- Timur, L. J. (2018). *Median Improvisasi & Inovasi* (Y. Hermawan, Ed.; 1st ed.). Sumber Inspirasi Pendidikan.